

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dunia mengalami perkembangan menjadi semakin modern saat ini. Untuk mencapai sebuah kepentingannya, Negara melakukan kerja sama. Secara umum, kerja sama merupakan salah satu kegiatan atau upaya untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan dua orang ataupun lebih. Menurut salah satu ahli seorang sosiolog, yaitu Charlie H. Cooley mengemukakan bahwa kerja sama akan hadir apabila adanya kesadaran bahwa mereka memiliki suatu kepentingan yang sama pada saat yang sama atau bersamaan, memiliki pengetahuan cukup atau luas serta kesadaran atas diri sendiri untuk mencapai sebuah kepentingan–kepentingan tersebut.(CNN, 2023)

Kerja sama Internasional terbagi dalam tiga bagian. Pertama, kerja sama bilateral yang dilakukan oleh dua negara yang dimana sama–sama menguntungkan bagi kedua negara tersebut. Kedua, yaitu kerja sama regional antar negara kawasan dan melibatkan lebih dari dua negara yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cepat pada kawasan regional. Ketiga yaitu kerja sama multilateral yang dilakukan oleh banyak negara dan bersifat global dimana kerja sama ini berjumlah lebih dari 2 negara.

Kerja sama memiliki peran penting dalam perkembangan dunia karena dapat menciptakan perdamaian dunia. Selain menjadi penghubung antar dua Negara ataupun banyak Negara, kerja sama menjadi sebuah sarana kepentingan nasional untuk melengkapi kebutuhan masyarakat pada masing–masing Negara

serta memperkuat hubungan antar negara karena kerja sama dapat mencegah terjadinya konflik dan dapat membangun citra Negara yang positif.

Pada Desember 2019 Pandemi *Coronavirus Deaseases* atau yang biasa dikenal dengan *Covid-19* muncul pertama kalinya di Wuhan, China. Sedangkan di Indonesia *Covid-19* dilaporkan masuk untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Wabah ini menyebar dengan sangat cepat ke 99% dari PDB dunia. *Covid-19* ini merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh adanya virus *Serve Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (*SARS-CoV-2*) atau bisa disebut dengan virus *Corona*.

Virus ini mengakibatkan gangguan pada pernapasan seperti adanya gejala awal yang dialaminya yaitu flu ringan sampai infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penyebaran virus ini bisa melalui beberapa cara seperti ketidaksengajaan menghirup droplet atau percikan air liur yang keluar berasal dari penderita *Covid-19*. Dengan melalui bersin, batuk, menyentuh mulut, hidung dan juga mata tanpa membersihkan tangan serta mencuci tangan setelah menyentuh benda yang sudah terinfeksi karena terkena oleh orang yang memiliki virus.

Pada awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* membuat dampak perubahan dengan dialaminya krisis pada berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat. Adanya sebuah kepentingan dalam upaya pemberantasan virus untuk mencegah dampak negatif yang masuk diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*. Kondisi ini menyebabkan sistem ekonomi Negara mengalami penurunan dan bertumbuh dengan lambat tidak hanya di Indonesia tetapi juga berdampak pada Negara lain yang memiliki sistem perekonomiannya maju.

Krisis menurut Robert P.Powell (2005) yaitu merupakan sebuah kejadian yang kehadirannya tidak diinginkan ataupun diharapkan. Karena hal tersebut memiliki dampak yang dapat menjadi awal sebuah kekacauan serta mampu menghancurkan organisasi tanpa adanya tindakan yang nyata dan terkadang kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat didefinisikan bahwa manajemen krisis menjadi salah satu respon dalam upaya pemecahan masalah melalui strategi yang didalamnya terdapat sebuah sistem 4R (*readliness, radar, response, recovery*).

Pertama, *readliness* membentuk sebuah tim manajemen khusus yang didalamnya terdiri dari penasihat krisis dan ahli media social. Kedua, *radar* yang membuat *response management SOP* dan *crisis* dengan diberlakukannya pengontrolan serta pertimbangan untuk menentukan skala pada prioritas. Ketiga, *response* yang membuat sebuah urutan pada beberapa tingkat urgensi dengan beberapa kode seperti hijau, kuning dan merah. Keempat, *recovery* yang membuat sebuah analisis terhadap pembangunan keunggulan dengan diberlakukannya suatu taktik pada *media social*.

Setelah melalui tahap 4R tersebut, proses tersebut akan disebar luaskan serta diinformasikan kepada semua masyarakat dengan menggunakan strategi aktif dengan *positive* konstruktif. Informasi tersebut disampaikan untuk menyusun sebuah kepercayaan bahwa pandemik ini bisa diatasi. Pengimplementasian strategi ini dilakukan melalui dua strategi yaitu, strategi *internal* yang menekankan satu sikap positif dan keyakinan saat *new normal* serta mengelola rumah sakit dan mekanisme kerja sesuai dengan protokol dan strategi eksternal melalui media cetak, elektronik maupun *online* dengan menginformasikan berbagai macam dukungan

yang dilakukan oleh TNI AL dalam menangani pandemi covid – 19. (Wahdaniah dan Wahid, 2020)

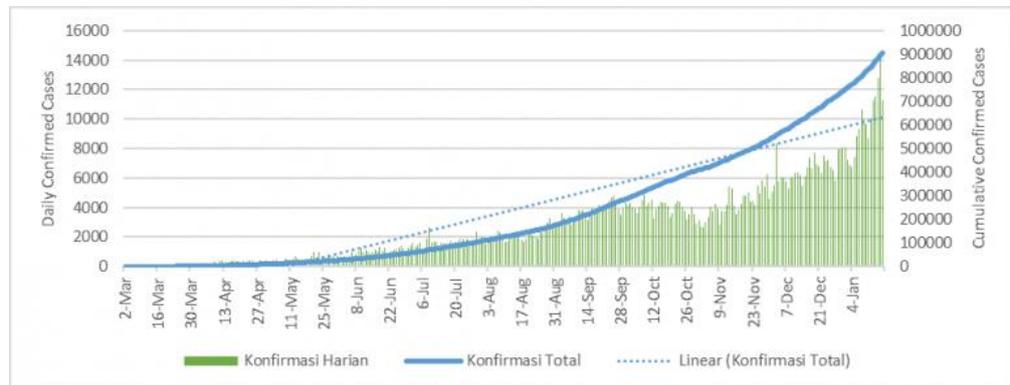
Dalam studinya Hubungan Internasional memiliki arus utama yang mengatakan bahwa sebuah kepentingan nasional merupakan suatu hal mendasar bagi Negara pada saat berinteraksi dan berhubungan dengan Negara lain. Adapun sebuah wujud dari penguatan pada *power* serta perluasan pada pengaruh yang dimana kepentingan nasional di setiap Negara itu dapat membentuk dan memperkuat sebuah kendali suatu Negara.(Mardiana, 2020)

Adapun bentuk dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan China yaitu melalui diplomasi kesehatan sebagai alat penanggulangan pandemi *Covid-19*. Diplomasi kesehatan menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani krisis yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* yang dapat memberikan jalan bagi Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan vaksin. Dapat digambarkan bahwa diplomasi kesehatan global merupakan sebuah proses dimana dikemukakannya suatu kompromi dan kesepakatan yang dicapai dalam aliansi baru. Khususnya pada bidang kesehatan seperti salah satu bentuknya melalui vaksin yang dimana China melakukan penawaran nya ke Indonesia.

Hingga tanggal 18 Januari angka kasus *Covid-19* yang ada di Indonesia telah mencapai 907.929 kasus. Sedangkan kasus yang meninggal sudah tercatat sebanyak 25.987 jiwa. Berikut adalah sebaran kasus yang tercatat di Indonesia terhitung mulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai tanggal 18 Januari 2021:

**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Kasus Harian Covid-19 di Indonesia**

Update hingga 17 Januari 2020 Pukul 16.00



Sumber : Kementerian Kesehatan

<http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>

Sejak diumumkannya kasus *Covid-19* pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret silam, hingga bulan Januari 2021 kasus ini sudah berlangsung selama sepuluh bulan. Dikarenakan kasusnya yang terus melonjak, saat ini kondisi di China belum menunjukkan tanda – tanda pandemi ini akan berakhir. Terhitung sampai tanggal 17 Januari, seluruh provinsi yang ada di Indonesia telah melaporkan masuknya kasus *Covid-19*. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, Banten dan Bali merupakan daerah yang terkena kasus *Covid-19* tertinggi di Indonesia.

Dengan penambahan setiap harinya yang sudah menembus sebanyak 11.000 kasus membuat pemerintah gencar dengan mempercepat program vaksinasi. Vaksinasi merupakan program pemberian vaksin yang akan meningkatkan kekebalan pada seseorang secara aktif terhadap penyakit dimana nantinya apabila seseorang terkena penyakit tersebut tidak akan merasa sakit atau hanya mengalami

sakit ringan saja dan tidak menjadi sumber penularan. Dilansir dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Program vaksinasi memiliki tujuan untuk mengurangi risiko terhadap penularan virus *Covid-19* dengan membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*) yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok (*herd protection*). (Limanseto, 2022)

Pemerintah Indonesia mengupayakan ketersediaan pasokan vaksin untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakatnya setidaknya sebanyak 208.265.207 penduduk. Pengadaan vaksin tersebut dilakukan melalui sebuah perjanjian bilateral dan multilateral seperti *COVAX Facility* bersama GAVI dan WHO ataupun melalui donasi yang diberikan oleh negara – negara sahabat. Dilansir dari laman *Covid-19*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia telah memberikan izin dalam penggunaan 10 jenis vaksin.

Jenis vaksin pertama adalah vaksin Sinovac yang diberi nama *CoronaVac* yang berasal dari Sinovac Biotech Ltd China. Vaksin ini memiliki kandungan didalamnya patogen yang sudah dimatikan sehingga dapat merangsang untuk membentuk sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Penggunaan vaksin ini sebanyak dua dosis dengan jarak waktu selama 28 hari.

Vaksin kedua adalah vaksin Astrazeneca buatan dari perusahaan farmasi Inggris. Adanya kesamaan dengan vaksin Sinovac dimana pemberian dosis nya sebanyak dua kali penyuntikan yang berjarak 12 minggu per dosisnya. Cara kerja vaksin ini dengan membawa protein lonjakan masuk ke dalam sel tubuh, sehingga sel-sel dalam tubuh dapat membaca dan membuat salinan protein lonjakan dan

akhirnya sistem kekebalan dalam tubuh akan mengenali lalu melawan virus SARS-CoV2.

Selanjutnya jenis vaksin ketiga yaitu vaksin Moderna yang berbasis mRNA dan diklaim memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Cara kerja vaksin ini dengan menginstruksikan sel untuk membuat serta memproses protein lonjakan agar tubuh dapat merespon kekebalan dalam tubuh. Jenis vaksin ini berpusat di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh *Moderna Inc* dan *National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD)*.

Vaksin keempat buatan dari China *National Pharmaceutical Group Corporation* yang bernama vaksin Sinopharm. Jenis ini memiliki kesamaan dengan vaksin Sinovac yang merupakan vaksin inaktivasi. Selain itu pemberian dosis vaksin ini sebanyak dua dosis dengan interval selama tiga sampai empat minggu.

Jenis vaksin kelima yaitu Pfizer yang merupakan produk gabungan dari perusahaan Amerika Serikat dan Jerman dimana perusahaan farmasi AS menggandeng perusahaan farmasi asal Jerman BioNTech. Pemberian dosis pada jenis vaksin ini sebanyak dua kali dengan masa *interval* per dosis selama 21–28 hari. Pada 15 juli 2021 vaksin ini sudah mendapatkan izin dari BPOM sebagai penggunaan darurat. Vaksin ini diklaim memiliki tingkat efektivitas sebesar 95% untuk menangkal masuknya virus corona.

Keenam adalah vaksin yang diproduksi di India yaitu vaksin Novavax dengan menggunakan teknologi. Vaksin Novavax memiliki perbedaan dengan vaksin lainnya karena adanya kandungan berisikan protein untuk membawa fragmen virus tidak berbahaya untuk mendapatkan reaksi kekebalan dalam tubuh. Vaksin ketujuh yaitu vaksin Sputnik V yang dikembangkan di Russia oleh *The*

*Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology* dengan menggunakan *platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S)*. Vaksin ini sudah mendapat izin BPOM untuk digunakan pada kelompok usia 18 tahun keatas dan jenis vaksin ini diberikan sebanyak dua kali penyuntikan secara injeksi intramuscular dengan rentang waktu tiga minggu.

Vaksin kedelapan bernama vaksin Janssen ( J&J atau Johnson & Johnson ). Vaksin ini berasal dari perusahaan farmasi Belgia dan dikembangkan oleh *Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson*. Pemberian vaksin Janssen dengan dosis sekali suntikan yang digunakan pada kelompok usia 18 tahun ke atas.

Kesembilan yaitu vaksin Convidencia yang telah diterbitkan izin nya bersamaan dengan vaksin Janssen oleh BPOM pada tanggal 7 September 2021. Jenis vaksin ini dikembangkan oleh *CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology* dengan pemberian dosis satu suntikan dan sudah mendapat izin dari BPOM digunakan untuk usia 18 tahun keatas. Vaksin Convidecia merupakan vaksin vector dengan menggunakan Adenovirus.

Terakhir yaitu vaksin Zifivax yang diproduksi dan dikembangkan oleh *Anhui Zhifei Loncom Biopharmaceutical* dengan platform rekombinan protein sub-unit. Pemberian dosis pada vaksin ini sebanyak tiga kali dengan interval pemberian satu bulan dari pemberian dosis pertama. Vaksin ini sudah bisa digunakan oleh usia 18 tahun keatas. (Fadli, 2022)

Vaksinasi yang ada di Indonesia merupakan salah satu jatah dari WHO sebanyak 20% dari total populasi. Tetapi jumlah vaksin tersebut tidak cukup untuk memenuhi jumlah sasaran vaksinasi, oleh karena itu Indonesia harus melakukan kerja sama bilateral dengan Negara tetangga salah satunya China karena hubungan

diplomatknya sudah berjalan lebih dari 70 tahun sejak kemerdekaan Indonesia.(Margono et al., 2021)

Pemerintah China merespon virus *Covid-19* yang muncul di penghujung tahun 2019 dari negaranya sendiri dengan sigap memberikan bantuan pada negara lain dalam mitigasi *Covid-19*. Indonesia diklaim oleh Presiden China Xi Jinping menjadi salah satu negara prioritas dalam meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan selama pandemi karena pada saat awal pandemi intensitas kasus positif di Indonesia tidak terkendali. Dikarenakan hubungan antara kedua negara cukup baik dalam beberapa dekade belakang, Indonesia ditunjuk sebagai mitra kerja sama pengadaan vaksin di Asia Tenggara.

Indonesia dan China sama-sama mementingkan keselamatan juga kesehatan hidup rakyatnya dengan menentang adanya nasionalisme vaksin. Nasionalisme vaksin merupakan sebuah kondisi dimana suatu Negara ingin mengamankan pasokan stok vaksin demi untuk memenuhi kepentingan warga Negara nya. Dengan adanya *Covid-19* di dunia, berbagai Negara seperti China, Inggris, Rusia dan Australia saling berkompetisi untuk menemukan obat penawarnya yaitu vaksin. Namun apabila hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan muncul kekhawatiran terhadap nasionalisme vaksin pada situasi pandemi yang semakin memburuk. (CNN, 2021)

Saat menghadiri pertemuan *GAVI-COVAX Facility* bertajuk “*Investment Opportunity*” yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 15 April 2021, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno L.P Marsudi menegaskan bahwa menolak penimbunan, nasionalisme dan politisasi vaksin. Melalui *Covid-19 Vaccines Global Acces (COVAX)* Negara memiliki banyak peluang untuk

mendapatkan sebuah keuntungan. *COVAX Facility*, menjadi sebuah bentuk komitmen yang ditunjukkan dalam pengupayaan ketersediaan vaksin melalui berbagai kerja sama secara bilateral ataupun multilateral. (Kemenlu, 2021)

Salah satu manfaat dari kerja sama adalah untuk meningkatkan sebuah peluang dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Indonesia meraih keuntungan dalam sistem kerja sama vaksin dengan China karena menjadikan hubungan ini sebagai salah satu sumber *power* Indonesia dalam melakukan aktivitas diplomasi. Indonesia pun memanfaatkan instrumen politik luar negerinya dengan diplomasi multilateral guna menghadapi pandemi. Apabila dilihat melalui sudut pandang dari Indonesia, China menjadi salah satu target diplomasinya karena memiliki wadah yang memadai untuk membantu Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Tetapi sebaliknya apabila dilihat dari sudut pandang China, adanya pandemi ini bisa menjadi peluang untuk terus memajukan Negara nya dengan memanfaatkan vaksin sebagai alat utama terjalankannya sebuah kerja sama. Kerja sama ini sangat menghasilkan dan menjadi kekuatan karena adanya relasi dagang pada kedua Negara Tersebut. China ikut serta dalam membantu memfasilitasi produksian vaksin di Indonesia dengan adanya harapan Indonesia sebagai produsen vaksin untuk kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, China akan menjamin pasokan vaksin untuk Indonesia sebagai salah satu cara bentuk dukungannya dengan membagikan pasokan dan membantu dalam memenuhi sasaran vaksin harian Indonesia. Vaksin dinilai menjadi salah satu pemegang peran penting dalam berjalannya pemulihan ekonomi regional oleh pengamat China.

Tidak hanya membantu negara lain dalam menangani *Covid-19*, tetapi China memiliki motif lain dari tujuannya berkaitan dengan suatu kepentingan nasional China. *Strategi Global Public Good* menurut Huang akan mencatat China menjadi pemimpin dalam kesehatan global yang dimana adanya langkah Presiden Xi Jinping menawarkan vaksin ke seluruh dunia. Hal tersebut akan menjadi pengaruh pada ambisi China untuk meningkatkan hegemoni China. (CNN, 2020)

Selain sisi positif dan keuntungan yang dihasilkan oleh terjalannya kerja sama antar dua negara atau bilateral, tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sampai menggeser hak tenaga kerja warga Indonesia dan hubungan tersebut menjadi sebuah ketergantungan pada negara lain menjadi dampak negatif dari terjalannya sebuah kerja sama antar negara. Adanya depedensi atau ketergantungan terhadap jumlah suplai vaksin dari China membuat Indonesia tidak bisa melepaskan hubungannya. Karena, apabila penyebaran ini tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan semakin menimbulkan dampak pada segala aspek kehidupan.

Pemanfaatan kerja sama melalui vaksin oleh China salah satunya untuk memajukan sebuah kepentingannya melalui suplai mesin pendingin yang sejalan dengan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat ekonomi, diplomatik dan geopolitik. *Belt dan Road Initiative* menjadi salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk memperkuat sebuah pengaruh pada ekonomi Beijing. Hal tersebut melalui suatu program yang menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur suatu Negara.

Selain itu, depedensi vaksin ini akan menambah hutang diplomatis bagi Indonesia yang pada akhirnya dapat memajukan sebuah kepentingan regional China di masa mendatang terutama pada isu Laut China Selatan. Dengan adanya pasokan yang banyak dari China membuat kedua negara tersebut memegang IOU atau surat utang diplomasi dengan kepentingan tinggi. (Margono et al., 2021)

Melihat adanya pandemi *Covid-19* yang sedang mewabah hingga menjadi sebuah persoalan, pada tanggal 10 Maret Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menulis surat untuk Presiden Indonesia. Surat ini terdiri dari enam buah rekomendasi pilihan untuk menghadapi virus yang sedang terjadi di Indonesia baik yang sedang terdeteksi ataupun tidak terdeteksi. Dan salah satu suratnya berisikan sebuah himbauan untuk pemerintah Indonesia agar dapat bisa lebih meningkatkan mekanisme tanggap darurat dalam menangani pandemi *Covid-19* termasuk deklarasi darurat nasional.

Untuk menangani krisis pandemi tersebut, maka pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Salah satu nya pada tanggal 15 Maret 2020 Presiden menginginkan pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan mengenai pembelajaran yang dilakukan dari rumah bagi pelajar ataupun mahasiswa. Dengan adanya kasus positif yang terus meningkat pada akhir Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2020 yang dilaporkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* bahwa jumlah pasien yang sudah terpapar virus telah mencapai 1.406 orang.

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan akhirnya Presiden Indonesia menetapkan sebuah peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, PSBB merupakan sebuah pertimbangan dalam rangka untuk mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

PSBB ini berlaku mulai sejak tanggal 1 April 2020. Dengan cara membatasi jarak dan aktivitas dalam sebuah kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan sampai melibatkan sekumpulan orang banyak. Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk menekankan penyebaran pada virus dan upaya untuk memutus rantai penularan *Covid-19*.

Selain itu, PSBB merupakan pembatasan pada sebuah kegiatan tertentu yang ada pada suatu wilayah dan diduga telah terinfeksi oleh virus *corona*. Diberlakukannya PSBB ini adalah untuk dapat mencegah segala kemungkinan penyebaran virus *corona*. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Untuk dapat menerapkan PSBB ini maka suatu wilayah harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu. Pertama dilihat dari adanya kenaikan dari jumlah kasus dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit serta dapat menyebar dengan cepat pada berbagai wilayah. Lalu, dilihat dari adanya keterkaitan ataupun relevansi epidemiologis dengan kejadian yang sama atau serupa pada wilayah dan Negara lain.

Gambar 1.2 Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah Indonesia



Sumber : Indonesia Baik.id

<https://indonesiabaik.id/infografis/penerapan-psbb-di-sejumlah-wilayah-indonesia>

Ditinjau dari gambar tersebut, provinsi pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah DKI Jakarta. Provinsi ini menjadi sebuah titik episentrum terjadinya penyebaran virus *corona* yang ada di Indonesia. Setelah provinsi DKI Jakarta, penerapan PSBB diikuti oleh beberapa provinsi lainnya seperti Jawa Barat.

Selain itu, untuk mengajukan penerapan PSBB pada suatu wilayah maka Gubernur, Bupati ataupun Walikota harus melakukan permohonan kepada Menteri dengan disertai oleh data – data pendukung seperti:

1. Data peningkatan pada jumlah kasus berdasarkan kurun waktu.

Hal tersebut harus disertai oleh kurva epidemiologi karena kurva ini dapat menunjukkan pergerakan serta kenaikan pada jumlah kasus *Covid-19*. Dengan adanya kurva ini, Pemerintah dapat memastikan waktu yang tepat untuk melonggarkan atau memperketat penerapan PSBB pada suatu wilayah. Selain itu sebagai pendukungnya maka dibutuhkan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah mengenai peningkatan data yang sedang terjadi.

## 2. Data penyebaran pada kasus berdasarkan kurun waktu.

Penyajian data ini harus disertai dengan adanya sebuah penyebaran berdasarkan waktu. Sama seperti poin pertama dimana dibutuhkannya pemeriksaan pada data penyebaran yang terjadi oleh Pemerintah Daerah.

## 3. Data kejadian transmisi lokal.

Kejadian ini disebabkan oleh adanya penyebaran dan disertai suatu hasil dalam penyelidikan epidemiologi dimana disebutkan terjadinya penularan pada generasi selanjutnya, generasi kedua dan ketiga.

Selain itu, terdapat kesiapan – kesiapan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, mengenai aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat dimana pada saat diterapkannya PSBB ini masyarakat akan merasakan kesulitan dengan mencari nafkah karena aktifitas yang terbatas. Kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang harus dihitung oleh Pemerintah Daerah mulai dari ketersediaan ruang untuk isolasi, karantina dan kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD), masker dan alat-alat kesehatan lainnya. Ketiga, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak dan aspek keamanan yang sebelumnya dapat dikoordinasikan bersama aparat penegak hukum. (Kartikaningrum, 2020)

Pada pelaksanaannya, PSBB ini diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang. Masa inkubasi ini merupakan sebuah kondisi waktu antara terjadinya awal terinfeksi atau paparan sampai munculnya sebuah gejala. Masa inkubasi ini akan muncul dalam kurun waktu 2–14 hari. Tetapi kondisi tersebut masih bisa diperpanjang apabila terlihat adanya sebuah bukti penyebarannya kasus.

Terdapat sebuah keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam salinan *database* peraturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI berisikan sebuah Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai *Covid-19* yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 di Jakarta. Keputusan ini menetapkan tiga poin penting didalamnya yaitu :

1. Ditetapkannya *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Ditetapkannya kedaruratan kesehatan masyarakat *Covid-19* di Indonesia yang wajib melakukan upaya untuk menanggulangi dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Presiden mengenai *Covid-19* berlaku mulai pada tanggal yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang terjadi di Indonesia ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Kerja Sama Bilateral Indonesia–China dalam Menangani Krisis Pandemi Covid di Indonesia Tahun 2019–2021”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Efektivitas Kerja Sama Indonesia dan China dalam penanganan Pandemi Covid-19?”**

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis akan membatasi masalah agar lebih fokus terhadap masalah penelitian.

Dalam hal ini, penulis membuat pembatasan masalah pada seputar ruang lingkup kerja sama bilateral antara Indonesia dan China di Indonesia pada tahun 2019–2021. Penelitian ini berfokus pada bentuk kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan China di masa pandemi. Kerja sama ini dilakukan melalui dua program utama yang di *highlight* atau menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama yaitu melalui pengiriman bantuan alat kesehatan dan kedua yaitu pada pengadaan vaksin.

Penulis menggunakan dua alat analisis yang dapat membantu dalam penelitian ini. Dengan menggunakan konsep kerja sama bilateral yang berfungsi sebagai alat penghubung antar Negara untuk dapat menjalankan upaya pemulihan yang diakibatkan oleh pandemi. Melalui sebuah konsep *health security* pada studi kasus ini akan lebih memperhatikan dan memperlihatkan sebuah sistem keamanan ataupun upaya untuk menangani masalah pada kesehatan yang apabila tidak dilindungi akan berubah menjadi sebuah ancaman.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Indonesia dalam menangani krisis yang diakibatkan oleh *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari kerja sama bilateral Indonesia–China dalam penanganan krisis pandemi *Covid-19* tahun 2019 – 2021.
3. Untuk mengetahui kondisi Indonesia pasca program Vaksinasi.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian diharapkan menjadi manfaat bagi dunia pendidikan dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah wawasan tentang Kerja sama Bilateral antara Indonesia dan China pada masa pandemi *Covid-19*.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian lainnya yang dimana memiliki relevansi pada topik pembahasan dan menjadi tambahan literatur dalam menganalisis serta mengkaji suatu isu Studi Ilmu Hubungan Internasional pada penelitian selanjutnya.

4. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.